

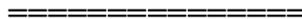


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI**



**LAPORAN KINERJA**  
**(LAKIN)**

**TAHUN 2024**



# DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	1
B. KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH ANTISIPATIF .....	1
BAB I.....	3
A. LATAR BELAKANG .....	3
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	3
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI .....	8
BAB II.....	12
A. Visi Direktorat Jenderal Pajak .....	12
B. Misi Direktorat Jenderal Pajak.....	12
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja .....	13
BAB III.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
B. REALISASI ANGGARAN .....	38
BAB IV .....	40
LAMPIRAN I.....	41
LAMPIRAN II.....	44

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Target penerimaan pajak KPP Pratama Singosari Tahun 2024 adalah sebesar Rp599.965.795.000, jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yakni sebesar Rp441.513.083.000, maka terdapat kenaikan target sebesar 35,88%. Pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Singosari dengan *cut-off* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 600.401.872.774, sehingga terdapat pertumbuhan neto menjadi 31,93% dari tahun sebelumnya.

Rata-rata IKU dalam Laporan Nilai Kinerja Organisasi juga telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tercapai sebesar 110,35%, dari 20 IKU yang ditetapkan pada awal Tahun 2024, secara keseluruhan realisasi IKU telah memenuhi target yang ditetapkan.

### B. KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Kendala terbesar yang masih dihadapi KPP Pratama Singosari pada Tahun 2024 adalah masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban melaporkan SPT tahunan yang berpengaruh pada realisasi persentase kepatuhan pelaporan dan pembayaran oleh Wajib Pajak. Namun untuk kepatuhan pelaporan dapat tercapai 100% di pertengahan Tahun 2024 dengan capaian 109,67%.

Langkah antisipatif yang telah dijalankan yaitu tetap memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dengan menambah frekuensi kegiatan TPT jarak jauh, Pojok Pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan secara daring maupun luring, serta tetap menyediakan layanan tatap muka dan membuka saluran layanan konsultasi dan pengajuan permohonan secara online, dan juga tetap bersinergi, bekerja sungguh sungguh dalam melakukan penggalian potensi, juga dalam mengamankan seluruh IKU agar tetap dapat memberikan hasil akhir yang terbaik.

Hal ini dilakukan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak agar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat berjalan dengan lancar.

Malang, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Singosari



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ali Machfud



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki tugas utama yaitu menghimpun penerimaan pajak untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

Pada awal Tahun 2024 KPP Pratama Singosari diberi tugas untuk menghimpun pajak sebesar Rp 490.876.920.409, namun pada bulan Agustus terdapat perubahan target menjadi Rp 572.306.373.000, selanjutnya pada bulan Desember kembali mengalami perubahan menjadi Rp 602.286.383.000 dan di akhir bulan Desember terjadi perubahan lagi menjadi Rp 599.965.795.000. Dengan tetap mengerahkan kerja keras dan usaha maksimal, KPP Pratama Singosari berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp600. 401.872.774 atau sebesar 100,07% dari target yang telah ditetapkan tersebut.

Penerimaan sebesar itu tentunya merupakan kontribusi dan hasil sinergi dari seluruh pegawai di KPP Pratama Singosari dalam membantu sumber pembiayaan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

### B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

#### 1) Tugas dan Fungsi KPP Pratama Singosari

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Singosari memiliki tugas sebagai berikut:

***“Melaksanakan pelayanan, edukasi, , dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.”***

Sesuai dengan pasal 59 Peraturan Menteri Kauangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak, KPP Pratama Singosari menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;*
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;*
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;*
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;*
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;*
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;*
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;*
- h. pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;*
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;*
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;*
- k. dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;*
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;*
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;*
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;*
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;*
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;*
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;*
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;*
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan*
- t. pelaksanaan administrasi kantor.*

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari pada dasarnya merupakan amanat seluruh rakyat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari berusaha menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan

semua pekerjaan yang dilaksanakannya baik yang berhasil atau yang gagal dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan dan harus dilaporkan secara transparan.

## 2) Visi dan Misi KPP Pratama Singosari

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari berpedoman pada visi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

***“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara “***

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari juga mempunyai visi pelayanan tersendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

***“Menjadi Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional“***

Pernyataan tentang tujuan, keberadaan, tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dituangkan dalam bentuk misi yang merupakan misi dari Direktorat Jenderal Pajak:

***Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:***

- 1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;***
- 2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;***
- 3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan***
- 4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.***

Sedangkan misi pelayanan yang akan diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, adalah:

***“Melayani dengan hati.”***

## 3) Tujuan dan Sasaran KPP Pratama Singosari

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari adalah sebagai berikut:

***“Menghimpun penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Melaksanakan pelayanan prima yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.”***

Sasaran KPP Pratama Singosari pada dasarnya merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dibuat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari telah menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. *Tercapainya rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan.*
  - b. *Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sehingga dapat diwujudkan:*
    - *Tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.*
    - *Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.*
  - c. *Terciptanya Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.*
- 4) Struktur Organisasi dan Komposisi SDM KPP Pratama Singosari

Dengan adanya reorganisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari terdiri atas:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- f. Seksi Pengawasan I
- g. Seksi Pengawasan II
- h. Seksi Pengawasan III
- i. Seksi Pengawasan IV
- j. Seksi Pengawasan V
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

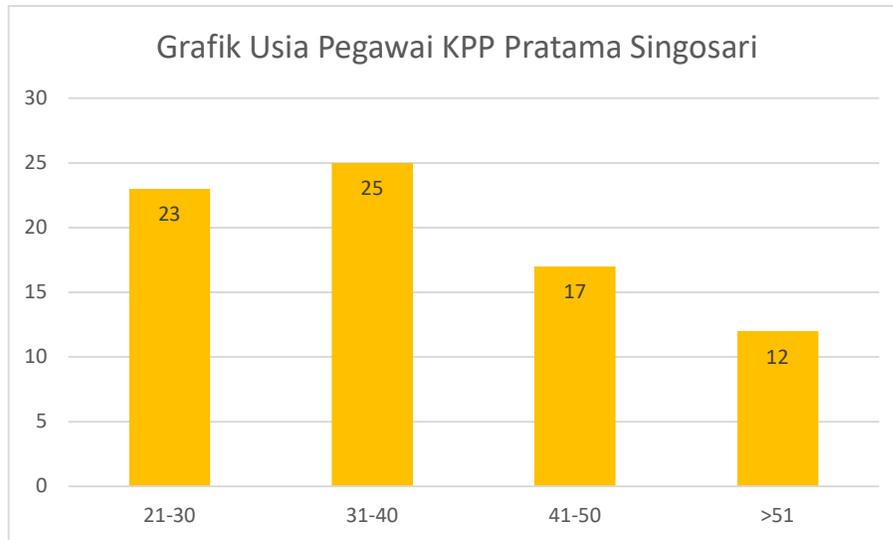
Per tanggal 31 Desember 2024, KPP Pratama Singosari memiliki 77 orang pegawai, dengan rincian dan komposisi sebagai berikut:

- Berdasarkan Unit Eselon III dan IV.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal : 11 orang.
  - b. Seksi Penjaminan Kualitas Data : 5 orang.

- c. Seksi Pelayanan : 15 orang.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan : 8 orang
- e. Seksi Pengawasan I : 7 orang.
- f. Seksi Pengawasan II : 5 orang.
- g. Seksi Pengawasan III : 7 orang.
- h. Seksi Pengawasan IV : 7 orang.
- i. Seksi Pengawasan V : 5 orang
- j. Fungsional Pemeriksa : 7 orang.
- Berdasarkan Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki : 43 orang.
  - b. Perempuan : 34 orang.
- Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
  - a. SMA : 1 orang.
  - b. Diploma I : 22 orang.
  - c. Diploma III : 16 orang.
  - d. Diploma IV/Sarjana (S1) : 26 orang.
  - e. Magister/Pasca Sarjana (S2) : 12 orang.
- Berdasarkan Usia Pegawai
  - a. 21-30 tahun : 23 orang.
  - b. 31-40 tahun : 25 orang.
  - c. 41-50 tahun : 17 orang.
  - d. 50 tahun ke atas : 12 orang.

**Grafik 1.1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur**



*Sumber: sikka-djp.intranet.pajak.go.id*

Berdasarkan grafik sebaran usia pegawai KPP Pratama Singosari di atas, komposisi usia pegawai mayoritas berada pada usia yang produktif, yakni pada rentang usia 40 tahun kebawah, sebanyak 48 pegawai atau sebesar 62%.

#### 5) Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari

KPP Pratama Singosari sebagai unit pelayanan pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diberikan tugas untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Kecamatan Singosari;
2. Kecamatan Lawang;
3. Kecamatan Karangploso;
4. Kecamatan Dau;
5. Kecamatan Pujon;
6. Kecamatan Ngantang;
7. Kecamatan Kasembon;
8. Kecamatan Pakis;
9. Kecamatan Jabung;
10. Kecamatan Tumpang;
11. Kecamatan Tajinan; dan
12. Kecamatan Poncokusumo.

### C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang perpajakan, dalam hal ini berarti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari menjadi penghimpun dana dari masyarakat.

Dalam perannya merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari di era globalisasi harus berpandangan jauh kedepan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih professional sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara professional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur. Atas hal ini kepala KPP Pratama Singosari menetapkan beberapa kebijakan dan program, yaitu:

#### 1. Kebijakan

Sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama Singosari memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Kepala KPP Pratama Singosari juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai target dan meningkatkan sarana pelayanan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan capaian penerimaan pajak baik rutin maupun effort
- b. Meningkatkan capaian kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT dan pembayaran pajak baik untuk WP PP 23 maupun WP non PP 23
- c. Peningkatan kompetensi pegawai/ SDM
- d. Memaksimalkan efektivitas penggunaan anggaran

#### 2. Program.

Dengan telah ditetapkannya kebijakan tersebut diatas maka program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan penerimaan pajak melalui penggalian potensi berbasis sektor dan kewilayahan
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pemeriksaan dan penagihan
- c. Penyuluhan dan sosialisasi pada UMKM terkait kebijakan perpajakan
- d. Mengintensifkan imbauan kepada WP untuk menyampaikan SPT
- e. Melaksanakan IHT, ICV, dan E-Learning untuk seluruh pegawai
- f. Melakukan dan pengendalian terkait kegiatan dengan pengeluaran anggaran

Pengelolaan penerimaan pajak oleh KPP Pratama Singosari dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh DJP. Realisasi dan pencapaian target

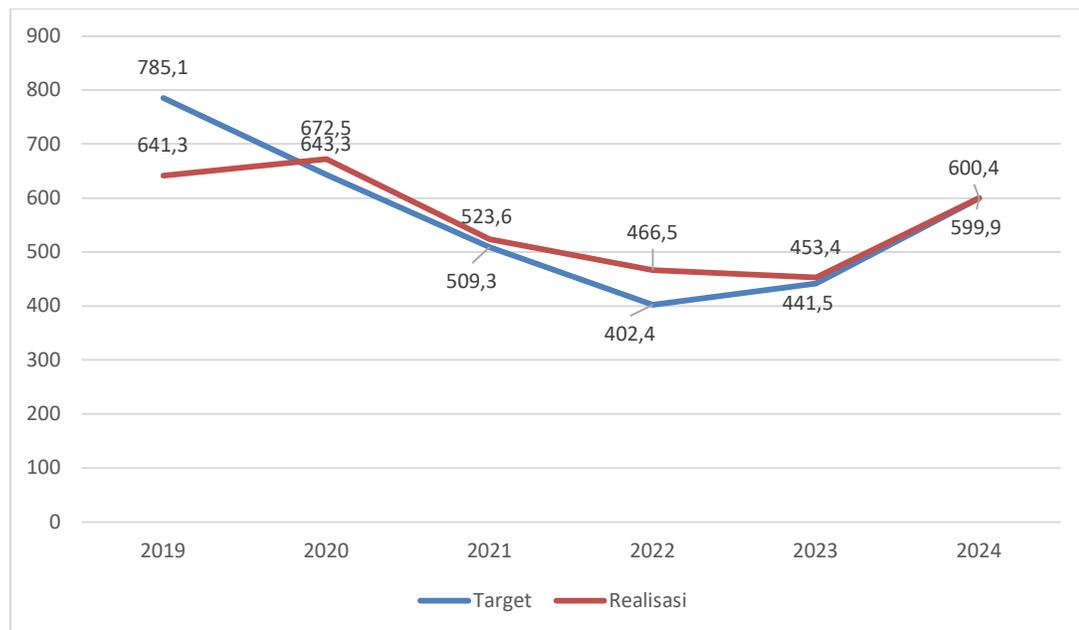
penerimaan pajak KPP Pratama Singosari untuk periode 2019-2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Singosari**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2019	785.149.230.000	641.303.402.078	81,68%
2020	643.307.949.000	672.498.178.468	104,54%
2021	509.265.700.000	523.640.934.578	102,82%
2022	402.407.688.000	466.515.785.782	115,93%
2023	441.513.083.000	453.480.750.848	102,71%
2024	599.965.795.000	600.401.872.774	100,07%

Sumber: *appportal.intranet.pajak.go.id*

**Grafik 1.2**  
**Tren Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Singosari**



Pada grafik di atas terlihat walaupun pada tahun 2019 penerimaan pajak di KPP Pratama Singosari belum mencapai 100%, namun tren angka mutlak realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, tentunya memberikan pengaruh yang signifikan pada penerimaan pajak, juga dengan dibuatnya beberapa

kebijakan serta fasilitas terkait keringanan pembayaran pajak, menjadikan menurunnya penerimaan di beberapa sektor ekonomi. Hal ini menjadi isu strategis dan masalah utama dalam pencapaian target tidak hanya untuk IKU dari Perspektif *Stakeholder* yakni IKU Penerimaan, namun juga untuk IKU-IKU lainnya, seperti IKU pada perspektif *Customer*, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Bahkan dengan kondisi pandemi yang menjadi isu strategis dan masih belum berakhir hingga saat ini, KPP Pratama Singosari harus tetap dapat meningkatkan kinerja agar dapat menjadi institusi yang dapat mewujudkan misi Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Visi Tahun 2020–2025 adalah “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”. Hal ini memiliki arti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak.

#### **B. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam hal ini, sebagai wujud dukungan DJP terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan upaya pelayanan yang berkualitas, DJP mewujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

KPP Pratama Singosari memiliki tugas untuk memenuhi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2024 oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan target target yang telah ditetapkan tersebut, diharapkan unit kerja tersebut dapat mengemban amanah dan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Kepala KPP Pratama Singosari Tahun 2024:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari**

No.	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%

		2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81
5	pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80%
		7b-CP	Efektivitas Penagihan	75%
		7c-N	Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan	80%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (Skala 100)
		10b-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	90%
11	Pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu komitmen yang dibuat dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kelemahan, peluang serta kendala/ hambatan yang timbul. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Singosari selaku penanggung jawab program/ kegiatan dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III selaku atasan langsung penanggung jawab program kinerja.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada saat ini KPP Pratama Singosari khususnya dan Direktorat Jenderal Pajak sedang dihadapkan pada kenyataan untuk meraih target penerimaan yang terus menerus meningkat. Muncul juga berbagai hambatan terutama terkait kegiatan visit Wajib Pajak, dan juga terhadap proses pemeriksaan lapangan, dan juga kegiatan penagihan. Kondisi paska pandemi ini tentunya juga berdampak pada nyaris seluruh sektor usaha dan menyebabkan menurunnya tingkat kolektibilitas atau kemampuan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama KPP Pratama Singosari Tahun 2024. Pembagian IKU berdasarkan jenis-jenis kegiatan/ program dalam beberapa kelompok perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Berikut penjelasan dan evaluasi secara detail untuk setiap IKU tersebut:

#### 1. Penerimaan pajak negara yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak, merupakan indikator untuk menilai kinerja KPP Pratama Singosari sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Target yang ditetapkan untuk KPP Pratama Singosari yakni sebesar Rp599.965.795.000. Formula IKU ini diperhitungkan dengan formula presentase realisasi penerimaan pajak dibanding target penerimaan pajak Pada Tahun 2024.

**Tabel 3.1**

**Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak (1) Tahun 2024**

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Penerimaan pajak negara yang optimal</b>			104,26%
<b>1a-CP</b> Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100,07%	100,07%
<b>1b-CP</b> Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100	110,00	110,00%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

**1a-CP** Persentase realisasi penerimaan pajak:

Perbandingan capaian angka mutlak dan persentase penerimaan pajak KPP Pratama Singosari 2020 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2020	643.307.949.000	672.498.178.468	104,54%
2021	509.265.700.000	523.640.934.578	102,82%
2022:	402.407.688.000	466.515.785.782	115,93%
2023:	441.513.083.000	453.480.750.848	102,71%
- Target awal :	490.876.920.409	600.401.872.774	-
- Target Revisi:	599.956.795.000	600.401.872.774	100,07%

**1b-CP** Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Singosari pada Tahun 2024 adalah 110,00% dari target yang telah ditetapkan.

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Pengawasan:
    1. Menginventarisasi potensi pajak Wajib Pajak besar dan penerimaan per sektor wajib pajak dan per jenis pajak untuk setiap seksi
    2. Mengumpulkan data internal dan eksternal. Data Internal mencakup data yang diperoleh melalui Approweb, Appportal, SIDJP, Alket, Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat, sedangkan data eksternal mencakup data yang diperoleh melalui pencarian internet, dinas terkait, atau aktivitas fisik (data lapangan)
    3. AR menganalisis menindaklanjuti data dari hasil pengumpulan tersebut, termasuk juga data pemicu dan data penguji pada Approweb dengan nilai data terbesar dan mendekati batas waktu penggalian potensi
    4. AR membuat Kertas Kerja Penelitian yang selanjutnya menjadi Laporan Hasil Penelitian (LHPT)
    5. AR menerbitkan dan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
    6. AR menunggu respon atau konfirmasi dari Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak merespon, AR akan melakukan tindakan konseling dengan cara memanggil Wajib Pajak yang bersangkutan atau melakukan kunjungan

- (visit). Apabila WP merespon maka bisa ditindaklanjuti dengan menerbitkan LHP2DK
7. Jika Wajib Pajak tidak mau bekerja sama dengan baik, AR bisa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
  8. Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran pajak
  9. Melakukan bedah WP dengan pemeriksa jika ditemukan potensi yang besar
  10. Meningkatkan kemampuan dalam sharing knowledge dengan rekan-rekan AR maupun pemeriksa
- Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak:
    1. Optimalisasi pengujian dalam proses pemeriksaan dengan beberapa metode / pendekatan dalam melakukan pengujian atas pos-pos yang diperiksa, penggunaan dasar hukum yang tepat dan benar dalam melakukan koreksi, serta memaksimalkan penggunaan data internal dan eksternal yang tersedia.
    2. Menentukan sasaran prioritas penyelesaian SP2 berdasarkan tingkat kolektibilitas / kemampuan membayar Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan jangka waktu dan jatuh tempo pemeriksaan.
    3. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan dan seksi terkait lainnya agar permohonan yang diterima dapat segera diproses dan alur berkas tidak ada yang terhambat
    4. Berkoordinasi dengan pihak instansi diluar DJP (Bank, BPN, Kepolisian) dalam upaya memperoleh informasi terkait Wajib Pajak,
    5. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait dalam rangka melaksanakan tindakan penagihan,
  - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
    - Pengawasan:
      - Pada Tahun 2024 penerimaan pajak KPP Pratama Singosari telah mencapai target yang telah ditetapkan karena upaya upaya yang dilakukan dilaksanakan dengan maksimal untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja Tahun 2024 adalah dengan melakukan dan

meningkatkan upaya - upaya effort yang disebutkan di atas dengan maksimal dan penuh tanggung jawab.

- Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak:
  - Disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan yang membatasi jumlah visit ke alamat Wajib Pajak dan tidak adanya nomor telepon yang dapat dihubungi pada permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
  - Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah selain membuat rekap permohonan pemeriksaan Tujuan Lain, yakni dengan menghubungi Wajib Pajak (yang terdapat nomor telepon di permohonan) untuk datang ke kantor dan menandatangani dokumen, dan untuk Wajib Pajak yang tidak terdapat nomor telepon diselesaikan dengan aturan yang berlaku agar permohonan tidak sampai melawati jatuh tempo.
  - Pengujian yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah optimal dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan menggunakan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga koreksi dan hasil pemeriksaan disetujui oleh Wajib Pajak.
  - Sasaran prioritas yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif sehingga membantu dalam pencapaian target kinerja pencairan ketetapan hasil pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan, serta meningkatkan capaian kinerja atas penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  - Keberhasilan yang dicapai dalam tindakan penagihan di Tahun 2024 karena ada penurunan target serta kemampuan/kemauan WP/PP untuk melunasi utang pajak, Adanya aturan yang memudahkan untuk pencairan utang pajak dengan cara pemblokiran rekening WP/PP di bank sebagai sarana untuk membayar/melunasi utang pajak,
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:
  - Pengawasan:
    - Dengan diadakannya monitoring dan evaluasi secara rutin oleh Kanwil DJP Jawa Timur III, dan IHT serta Forum AR baik yang terkait dengan fasilitas pajak dari DJP dalam masa pandemi, maupun yang terkait materi lainnya yang sangat bermanfaat untuk meratakan kompetensi AR pada KPP Pratama Singosari

- Pemberian layanan konsultasi secara online (Whatsapp atau Zoom)
- Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak:
  - Adanya kebijakan program Mini Reinventing / Quick Win di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III yang berimbas pada meningkatnya rasio ketertagihan/pembayaran Wajib Pajak atas ketetapan hasil pemeriksaan, maka dari itu dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung seperti sekarang.
  - Kelas/Bimtek Penagihan terutama tentang Aplikasi Baru di SIDJP dan SIDJPNINE,
  - Koordinasi pengaplikasian PMK-189 dalam tindakan penagihan dengan pihak terkait terutama perbankan,
  - Koordinasi dengan pihak lain dalam hal diperlukan data/informasi terkait harta, keuangan ataupun aset lain Wajib Pajak / PP dalam hal ini Perbankan, Kemenkumham, Imigrasi Kementerian Agraria (BPN),
  - IHT internal Seksi Penagihan,
  - Monitoring bulanan capaian tindakan penagihan, penerimaan penagihan dan extra effort.
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:
 

Terdapat rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan di awal Tahun 2024 untuk Sasaran Strategis Penerimaan Pajak yang Optimal, yaitu dengan melaksanakan IHT dan/ Forum AR serta melaksanakan rapat berkala secara triwulanan untuk FPP.
- Rencana aksi kedepan:
  - Pengawasan:
    - Melaksanakan upaya upaya effort yang disebutkan diatas sedini mungkin dan berusaha maksimal untuk mencapai target yang ditentukan
  - Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak:
    - Menyusun sasaran prioritas penyelesaian SP2 untuk Tahun 2024, berikut timeline penyelesaian pemeriksaan, perkiraan potensi pencairan ketetapan dan tingkat kolektibilitas dari masing-masing SP2.
    - Melakukan sinergi dengan Account Representative / Seksi dan Konsultasi untuk memperoleh gambaran dan kondisi usaha Wajib Pajak yang

sebenarnya beserta data dan informasi lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

- Melakukan sinergi dengan Account Representative / Seksi dan Konsultasi terkait dengan Pemeriksaan Rutin Lebih Bayar/Restitusi agar dapat dipetakan pengembalian kelebihan pembayaran Wajib Pajak mana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme pengembalian pendahuluan saja serta mana yang perlu diselesaikan melalui proses Pemeriksaan.
- Membuat usulan IHT/Sharing Session untuk meningkatkan kompetensi Tim Pemeriksa.
- Membuat monitoring sampai dengan proses input di aplikasi erag oleh Seksi Pelayanan, karena selama ini monitoring yang dilakukan hanya sampai dengan cetak LHP
- Menertibkan dan menatausahakan administrasi penagihan guna menunjang informasi yang valid Dan Pemberkasan Wajib Pajak,
- Profiling dan mapping 100 PP terbesar dan berkoordinasi dengan kanwil untuk Asset Tracing,
- Profiling Wajib Pajak yang sudah memasuki masa ketetapan akan daluarsa penagihan agar segera diterbitkan Surat Paksa,
- Tetap melakukan rangkaian tindakan penagihan dimulai dengan Surat Teguran - Surat Paksa - Kegiatan Sita dan profiling Wajib Pajak untuk kegiatan Blokir - Pencegahan dan untuk kandidat tindakan Gijzeling.

## 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi meliputi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM)

**Tabel 3.2**

**Capaian Sasaran Strategis**

**Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi Tahun 2024**

<b>Kode SS/IKU</b>	<b>Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Indeks Capaian</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,13%

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	100,07%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,67%	109,67%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

**2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:**

Perbandingan capaian angka mutlak dan persentase kepatuhan SPT WP KPP Pratama Singosari 2019 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target		Realisasi		Capaian
	%	WP Wajib SPT	%	Jumlah SPT	
2019	70	12.420	78,03	9.691	111,47%
2020	75	67.852	76,07	51.612	101,42%
2021	84	69.958	85,47	59.791	102,29%
2022:					
Strategis	100	499	100	499	75,63%
Kewilayahan	81	59.270	75,42	44.703	
2023:					
Strategis	100	499	100	499	100,45%
Kewilayahan	86	44.871	100,45	45.075	
2024:					
Strategis	100	718	109,67	45.257	109,67%
Kewilayahan	86	44.984	%		

**2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM):**

Perbandingan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Singosari Tahun 2022 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2022	332.778.081.000	387.174.859.339	116,35%
2023	409.180.634.000	414.453.480.000	101,41%
2024	419.766.822.126	499.391.974.126	118,96%

- Upaya extra effort yang telah dilakukan:
  - Pengawasan
    - Menindaklanjuti WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan tetapi terdapat data transaksi
    - Menerbitkan himbauan/teguran/Surat Tagihan pajak terhadap WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan
  - Pelayanan
    - Melaksanakan piket asistensi SPT Tahunan
    - Himbauan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (WA Blast/ email)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Adanya kebijakan PPKM membuat penerimaan SPT Tahunan OP sebagian besar dialihkan melalui laporan secara online dengan e-filing, kendala yang sering ditemui adalah masih banyak WP OP yang belum melek teknologi dan memahami tata cara pelaporan menggunakan e-filing. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut KPP Pratama Singosari telah menyediakan saluran layanan konsultasi melalui email kpp dan WhatsApp.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko
 

Pada Tahun 2024 terhadap IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan mitigasi risiko dengan melaksanakan Sosialisasi kepada WP OP terkait pelaporan SPT Tahunan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam wilayah kerja KPP Pratama Singosari.
- Rencana aksi ke depan
  1. Mengadakan tax gathering dengan WP-WP potensial dari sektor industri pengolahan, perdagangan.
  2. Melakukan penggalian potensi berbasis kewilayahan (kecamatan/kelurahan)
  3. Melakukan sosialisasi dengan Wajib Pajak per cluster seperti khusus perdagangan dan per wilayah

### **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi meliputi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM)

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,14%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,14%	100,14%

Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM) pada Tahun 2024 tergolong tinggi, salah satu penyebabnya adalah semakin membaiknya kondisi perekonomian setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Melakukan Piket SPT Tahunan dari awal Tahun 2024, dan tetap melaksanakan asistensi SPT tahunan secara daring melalui media sosial seperti Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Email resmi KPP Pratama Sigosari.
  - Mengawasi WP-WP yang tidak melakukan pelaporan dan pembayaran namun terdapat data perpajakan/kegiatan usaha yang diperoleh dari internal dan eksternal
  - Mengirimkan surat himbauan kepada WP untuk segera mengirimkan laporan pemanfaatan fasilitas melalui DJP Online
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
  - Tahun 2024 mengalami keberhasilan. Di antara faktor yang menunjang adalah pada awal tahun menerbitkan Surat Imbauan Kepatuhan kepada WP, dan sebelum adanya pandemi melakukan Layanan (pelaporan SPT) di Luar Kantor di Kantor-kantor Kecamatan di wilayah KPP Pratama Singosari, melakukan Jemput Bola ke tempat Pemberi Kerja yang memiliki jumlah karyawan yang signifikan besar, memberikan Sosialisasi/ Penyuluhan baik secara offline dan online (setelah terjadi pandemi), menyebarkan imbauan lapor SPT melalui WA Blast, dan layanan konsultasi pelaporan SPT secara online (Whatsapp).

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:
  - Kegiatan Sosialisasi dan pengiriman surat himbauan kepada wajib pajak memberikan dampak peningkatan realisasi yang cukup signifikan
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:
 

Terdapat rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan di awal Tahun 2024 untuk Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, yaitu dengan melakukan monitoring pemanfaatan data alket dan aroweb.
- Rencana aksi kedepan:
  - Tetap melakukan sosialisasi kepada WP terkait kepatuhan SPT melalui Zoom atau secara langsung apabila kondisi pandemi telah mereda dan memungkinkan
  - Melakukan kerja sama dengan perusahaan penerbit formulir bukti potong A1

#### 4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Cepatnya perubahan aturan-aturan perpajakan yang berlaku menuntut KPP Pratama Singosari untuk terus melakukan kegiatan pembinaan Wajib Pajak melalui penyuluhan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sangat penting dilakukan penentuan sasaran terhadap wajib pajak yang akan dilakukan penyuluhan yang nantinya akan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya dengan sukarela

**Tabel 3.4**

**Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan (3) Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			117,30%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	106,11%	106,11%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

**4a-CP** Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan:

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU baru, dan untuk capaian di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	70,00%	120,00%	120,00%
2024	74,00%	88,80%	120,00%

**4b-N** Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan:

Perbandingan capaian Indeks efektivitas pelayanan dan penyuluhan Tahun 2024 (indeks hasil survey):

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2021	79	84,00	106,33%
2022	80	91,29	114,11%
2023	81	82,03	101,33%
2024	100,00%	106,11%	106,11%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Pelayanan

Tahun 2024 mengalami keberhasilan. Hal tersebut dapat dicapai karena beberapa hal yaitu pada awal tahun sebelum pandemi penyuluhan kepada Wajib Pajak gencar dilakukan dengan mengunjungi beberapa kantor kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Singosari, Penyuluhan secara daring dilakukan dengan berb agai media seperti Zoom, Instagram Live, dan Whatsapp Group menyesuaikan dengan tema dan target audience, bekerja sama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk narasumber dan penyediaan sarana dan prasarana.
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
  - Dengan adanya pandemi yang memutus edukasi dan pelayanan tatap muka, tentunya memberikan dampak yang signifikan. Namun kegiatan tersebut tetap dapat dilakukan dengan mengandalkan layanan Zoom, serta media sosial lain untuk membantu wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan kebutuhannya terkait perpajakan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:
  - Memanfaatkan Whatsapp Blast untuk memberikan penyuluhan mengenai Kewajiban Wajib Pajak Baru setiap awal bulan; Memberikan penyuluhan baik

secara langsung maupun daring kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan Whatsapp Blast untuk menjaring peserta penyuluhan; Mengadakan sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan di luar kantor dengan mengunjungi beberapa kecamatan; Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM terkait penyelenggaraan BDS.

- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:  
Untuk kedua IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, sehingga tetap melaksanakan SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang sudah ada, yaitu tetap memberikan pelayanan, edukasi, dan penyuluhan yang optimal kepada Wajib Pajak.
- Rencana aksi kedepan:
  - Pelayanan:
    - Menyusun rencana kerja penyuluhan dengan melakukan penyesuaian pada kondisi pandemi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.

#### 5. Pembayaran masa yang efektif

Sasaran strategis pembayaran masa yang efektif meliputi kegiatan pembayaran masa. Persentase Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Pembayaran Masa yang Efektif Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5	pembayaran masa yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,46%	120,00%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

#### 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan IKU baru dan capaian di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	90,00%	120,00%	120,00%
2024	90,00%	114,46%	120,00%

- Upaya extra effort yang telah dilakukan:
  - Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran pajak
  - Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
  - Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching) berupa data pemicu dan atau data penguji serta pencarian data mandiri yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt atau SP2DK
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Selama Tahun 2024, kendala yang dihadapi KPP Pratama Singosari dalam memenuhi target realisasi pembayaran masa adalah kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan himbauan dan pengawasan yang intensif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko  
Terhadap IKU Persentase pembayaran masa dilakukan mitigasi risiko selama Tahun 2024 yaitu dengan melakukan monitoring terkait penerimaan sectoral, WP Strategis dan pengawasan pembayaran setiap masa pajak
- Rencana aksi ke depan
  - Menerbitkan STP secara selektif dengan prioritas terutama yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak
  - Melakukan pengawasan dinasimasi setoran PPh Pasal 25 terutama dinamisasi PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan
  - Melakukan tindak lanjut data matching

## 6. Kepatuhan material yang efektif

IKU ini mengukur tingkat efektifitas yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak yang berada dalam nya. ini dilakukan dengan penerbitan LHP2DK yang merupakan tindak lanjut dari SP2DK dan pemanfaatan data di aplikasi Approweb dan data lainnya hasil analisis AR. Terdapat capaian kualitas dan kuantitas dengan proporsi yang berbeda untuk IKU ini

Sedangkan untuk IKU IDLP adalah indikator untuk menghitung persentase usulan IDLP yang berindikasi kuat merupakan tindak pidana dengan melalui proses pemeriksaan bukti permulaan dan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**kepatuhan material yang efektif Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	kepatuhan material yang efektif			116,51%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,53%	109,53%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

**6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:**

Perbandingan capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) 2019 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2019	100,00%	196,00%	120,00%
2020	100,00%	107,12%	109,27%
2021	100,00%	127,18%	120,00%
2022	100,00%	110,02%	110,02%
2023	100,00%	118,80%	118,80%
2024	100,00%	120,00%	120,00%

**6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan:**

Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	100,00%	120,96%	120,00%

2024	100,00%	120,00%	120,00%
------	---------	---------	---------

**6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (IKU Baru):**

Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2024	100,00%	109,53%	109,53%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Meningkatkan penyelesaian dan tindak lanjut SP2DK terutama yang belum diselesaikan, untuk selanjutnya diterbitkan LHP2DK
  - Menyusun analisa resiko atas potensi Wajib Pajak terkait IDLP dan mengirimkan usul pemeriksaan ke Seksi P3
  - Meningkatkan kompetensi AR di KPP Pratama Singosari dalam hal pemanfaatan data dan penggalian potensi melalui IHT dan Sosialisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
  - Tahun 2024 mengalami keberhasilan walaupun terdapat beberapa kendala diantaranya tatap muka langsung dengan WP sangat dibatasi (visit, korespondensi, konsultasi), surat yang dikirim tidak sampai ke tangan WP, sarana dan prasaranan penunjang dalam rangka penggalian potensi selama WFH terbatas. Terkait beberapa kendala tersebut telah disiasati dengan melakukan pengiriman surat, konsultasi dan korespondensi via telepon, chat dan WA.
  - Pengukuran atas pencapaian IKU ini dapat dimonitoring melalui aplikasi Approweb dan Mandor-DJP. Faktor yang mempengaruhi antara lain tidak semua AR memahami analisa laporan keuangan dan data yang ada pada approweb yang belum tentu bisa ditindaklanjuti.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:

- Melakukan pengiriman surat, konsultasi dan korespondensi via daring (telepon, email, chat dan WA)
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:  
Untuk kedua IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 telah melebihi 100%
- Rencana aksi kedepan:
  - Melanjutkan kegiatan Tahun 2024 yang sudah berjalan dan memanfaatkan data internal maupun eksternal untuk dilakukan tindak lanjut penggalian potensi.

## 7. Penegakan Hukum yang Efektif

Pada Sasaran Strategis ini, terbagi 3 IKU untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan penagihan dan pemeriksaan.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Penegakan Hukum yang Efektif Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69%
7a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00%
7b-CP	Efektivitas Penagihan	75,00%	97,97%	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

### 7a-CP Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (IKU Baru):

Perbandingan capaian Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Tahun 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2024	100,00%	120,00%	120,00%

### 7b-CP Efektivitas Penagihan:

Perbandingan capaian Efektivitas Penagihan tahun 2021 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2021	70,00%	104,39%	120,00%
2022	75,00%	112,78%	120,00%
2023	75,00%	107,12%	120,00%
2024	75,00%	97,97%	120,00%

**7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (IKU Baru):**

Capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2024	100,00%	100,00%	100,00%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Melakukan persuasi dan edukasi kepada Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan agar hasil pemeriksaan tidak berpotensi menimbulkan konflik/sengketa, serta untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  - Melakukan tindakan penagihan persuasif terhadap Wajib Pajak,
  - Melakukan profiling Wajib Pajak potensial dalam rangka melaksanakan tindakan penagihan dan pencairan utang pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
  - Wajib Pajak ditemukan namun tidak ada itikad baik untuk melunasi Pajak, padahal jika Secara material, dapat dinilai mampu untuk membayar pajak
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

Untuk ketiga IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024,
- Rencana aksi kedepan:
  - Karena realisasi Tahun 2024 sudah melebihi target, maka tidak dilakukan mitigasi, dan rencana aksinya adalah untuk selalu berusaha memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan beserta kewajiban perpajakannya.

## 8. Data dan Informasi yang berkualitas

Optimalisasi data perpajakan dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan untuk memberikan data perpajakan yang akurat kepada unit kerja lain sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak

**Tabel 3.8**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Data dan Informasi yang Berkualitas Tahun 2024**

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Data dan Informasi yang berkualitas</b>			120,00%
<b>8a-CP</b> Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	145,28%	120,00%
<b>8b-CP</b> Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2023*

### **8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan:**

Capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan Tahun 2023 dan 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	100,00%	115,01%	115,01%
2024	100,00%	145,28%	120,00%

### **8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP:**

Capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2023 dan 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	55,00%	92,00%	120,00%
2024	55,00%	100,00%	120,00%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
  - Pengawasan:
    1. Update Profil Wajib Pajak WP Besar Strategis
    2. Mengirimkan data potensi Wajib Pajak (Alket) ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
  - IKU penyediaan data potensi, realisasi yang dihitung hanya yang direkam oleh AR saja, sehingga AR perlu usaha ekstra dalam menggali potensi dan merekam data potensial yang ditemukan di aplikasi SIDJP-NINE Alket.
  - Adanya pembaruan terhadap aplikasi alket, dan perekaman SE-11/ alket KPDL yang masih tergolong baru sehingga masih banyak AR yang belum memahaminya  
Alternatis solusinya adalah dengan mengadakan bimtek Alket KPDL sehingga dapat dimengerti oleh seluruh AR
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:  
Untuk kedua IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 telah melebihi 100%
- Rencana aksi kedepan:
  - Rencana aksi yang dilakukan yaitu tetap melakukan pengemasan secara tepat dan efisien,
  - Menginventarisasi data dan alat keterangan (pendukung penggalian potensi) terutama yang melibatkan kegiatan KPDL secara rutin dan meningkatkan realisasinya.

## **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Setiap tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menentukan jumlah jamlat untuk mencukupi kebutuhan pengembangan diri setiap pegawai. Melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan pegawai dapat meningkatkan hardskill maupun softskill sehingga dapat bekerja secara Professional. IKU ini menjadi indikator jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat.

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan

Dialog Kinerja Organisasi adalah hal yang baru diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko, pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

**Tabel 3.9**

**Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (7) Tahun 2024**

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>			114,55%
<b>9a-N</b> Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	113,76	113,76%
<b>9b-N</b> Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,42	109,91%
<b>9c-N</b> Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	116,15	120,00%

*Sumber: Laporan NKO Tahun 2024*

**9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM:**

Perbandingan capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2021 dan 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2021	75,00%	82,86%	110,48%
2022	90,00%	100,00%	111,11%
2023	77,00%	100,00%	120,00%
2024	100,00	113,76	113,76%

o

**9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit:**

a. Perbandingan capaian Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2021 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2021	80,00	122,50	120,00%
2022	85,00	107,35	120,00%
2023	85,00	108,50	120,00%
2024	85,00	93,42	109,91%

**9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko:**

Perbandingan capaian Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan Tahun 2019 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2019	90,00%	100,00%	111,11%
2020	90,00%	93,75%	104,17%
2021	90,00%	100,00%	111,11%
2022	90,00%	100,00%	111,11%
2023	90,00%	99,34%	110,37%
2024	90,00	116,15	120,00%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya yang telah dilakukan:
  - Melaksanakan kegiatan IHT di dalam kantor

- Membuat ND untuk mengingatkan pegawai supaya menyelesaikan e-learning tepat waktu
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:  
 Dalam memenuhi IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi ditemui beberapa kendala antara lain:
  - Pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses <http://studia/>
  - Pegawai disibukkan dengan pemenuhan pekerjaan lain terkait tugas dan fungsi masing-masing seksi

Meskipun kendala tersebut menghambat pemenuhan realisasi IKU, tetapi dengan dibuatnya Nota Dinas yang membantu mengingatkan penyelesaian e-learning, para pegawai dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan tepat waktu
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:  
 Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 telah mencapai 100%
- Rencana aksi kedepan:  

IKU ini adalah IKU yang mampu membantu atau mendongkrak IKU yang lainnya yang kemungkinannya kecil untuk tercapai. Oleh karena itu, IKU jamlat harus tercapai dengan maksimal, sehingga rencana aksi kedepannya adalah mempertahankan semangat seluruh pegawai untuk tetap melaksanakan e-learning dengan maksimal

Dalam rangka mencapai target kinerja penerimaan pajak baik netto maupun effort yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

  - Upaya extra effort yang dilakukan:
    - Melakukan evaluasi atas NKO dan Manajemen Risiko secara rutin pada setiap triwulan melalui DKO yang efektif
  - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
    - Kompilasi data untuk masing-masing IKU dari setiap seksi pengampu membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu diusahakan untuk dapat membuat Nota Dinas permintaan data lebih awal dari jadwal pelaksanaan rapat DKO.
  - Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 telah melebihi 100%

- Rencana aksi kedepan:
  - Memastikan kelengkapan dokumen dan materi untuk pelaksanaan DKO
  - Memastikan kehadiran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan DKO

## 10. Pengelolaan keuangan yang optimal

Sesuai dengan manual IKU dan formula yang telah ditetapkan, tujuan dari IKU ini yakni untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan, efisiensi dan pencapaian output agar tepat sasaran dan sesuai dengan program dan kebijakan dari unit kerja

Tabel 3.10

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang akuntabel Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Pengelolaan Keuangan yang akuntabel</b>			
11a-N indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

### 11a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran:

- a. Perbandingan capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2019 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2019	95,00%	95,32%	100,34%
2020	95,00%	92,59%	97,46%
2021	95,50%	99,09%	103,76%
2022	95,50%	94,07%	98,50%
2023	95,50	93,00	97,38%
2024	100,00	120,00	120,00%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya yang telah dilakukan:
  - Berkoordinasi dengan tim pengelola keuangan dan pihak pihak yang terkait agar efisiensi penggunaan anggaran bisa tercapai.
  - Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran serta pada SPM yang akan disampaikan ke KPPN
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:
  - Untuk memonitoring IKU ini adalah menggunakan aplikasi OM-SPAN dan SMART, sehingga perlu untuk di evaluasi pada setiap triwulan dan memastikan untuk selalu mencapai target yang ditentukan
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:
 

Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024.
- Rencana aksi kedepan:
  - Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait penyerapan anggaran.
  - Meneliti SPM yang akan disampaikan ke KPPN dan membuat monitoring jangka waktu penyelesaian dan pengiriman SPM termasuk SPM-KP

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari memperoleh dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan jumlah sebesar Rp 5.265.628.000. Untuk data lebih detilnya sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

**Tabel Realisasi Belanja Satker PerJenis Belanja Tahun 2024**

Jenis Belanja	Keterangan			
	Pagu	Real	%	Sisa
Pegawai	636.795.000	606.078.000	(95,18%)	30.717.000
Barang	4.136.358.000	4.105.008.950	(99,24%)	31.349.050
Modal	503.306.000	500.242.479	(99,39%)	3.063.521
<b>TOTAL</b>	<b>5.276.459.000</b>	<b>5.211.329.429</b>	<b>(98,77%)</b>	<b>65.129.571</b>

*Sumber: OM-SPAN*

Dana yang tersedia tersebut digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan yang menopang kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari pada Tahun 2024 dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berkurangnya imbas dari pandemi COVID-19 yang menghambat beberapa lajur perekonomian dan juga sudah mulai bertumbuhnya perekonomian nasional di tahun 2024 ini, hal tersebut menjadikan semangat dan sinergi dari seluruh elemen di KPP Pratama Singosari untuk tetap berorientasi pada pelayanan dan tetap memberikan yang terbaik.

Adanya tuntutan dari masyarakat untuk dapat tetap menerima pelayanan prima, maka seluruh pegawai KPP Pratama Singosari berupaya untuk selalu beradaptasi, membenahi diri, agar dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini tetap dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut dengan bertindak lebih cepat, tepat, akurat, dan terbuka sehingga dapat diwujudkan:

1. Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan.
3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Dengan ketiga faktor tersebut di atas, maka akan dapat diwujudkan “**Masyarakat sadar dan peduli pajak**“ yang nantinya berdampak pada penerimaan negara di sektor perpajakan menjadi lebih meningkat sehingga menciptakan kemandirian pembiayaan negara.

Disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sehingga kedepannya pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari akan menjadi lebih baik lagi.

Malang, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Singosari



Ditandatangani Secara Elektronik

Ali Machfud



### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	110,00	110,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	100,07%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,67%	109,67%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,14%	100,14%

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	88,80%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,11%	106,11%
5	pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,46%	114,46%
6	kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,96%	120,00%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,53%	109,53%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%	97,97%	120,00%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	145,28%	120,00%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	113,76	113,76%

		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,42	109,91%
		9c-N	Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko	90,00	116,15	120,00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp5.276.459.000

Jumlah Realisasi Anggaran : Rp5.211.329.429

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan	75%

		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%

		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (Skala 100)
		9c-N Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko	90%
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

<b>Program/ Kegiatan Tahun 2024</b>	<b>Anggaran</b>
A Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 638.233.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 183.095.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 245.028.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 210.110.000
B Program Dukungan Manajemen	Rp 4.256.192.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 3.656.151.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 600.041.000
<b>Total</b>	<b>Rp 4.894.425.000</b>

Malang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Jawa Timur III

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Singosari



Farid Bachtiar



Ali Machfud

**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

Kode	SS dan IKTI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	47%	47%	74%	74%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	47%	47%	74%	74%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode	SS dan IKTI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Malang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Singosari,



Ali Machfud

